



# **ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BATANG TAHUN 2010**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Batang  
Bekerjasama Dengan  
Badan Pusat Statistik Kab. Batang



# **ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BATANG TAHUN 2010**

Batang, Juli 2011

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Sekretaris

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Batang  
Bekerjasama Dengan  
Badan Pusat Statistik Kab. Batang

## KATA PENGANTAR

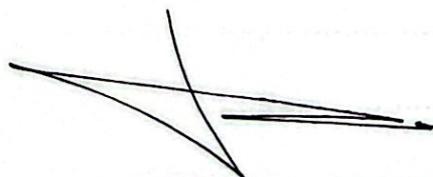
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan buku 'Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Batang tahun 2010'. Analisis Situasi Pembangunan Manusia merupakan tahapan dalam siklus perencanaan (planning cycle) yang lazim dilakukan setelah visi atau sasaran jangka panjang yang ditetapkan dengan tujuan mampu menyajikan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Batang.

Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah kegiatan perencanaan berikutnya yaitu menetapkan sasaran-sasaran jangka menengah atau jangka pendek dan mengidentifikasi kebijakan / strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, analisis situasi harus dilakukan menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap relevan, namun demikian suatu analisis dapat dianggap memadai jika sudah mencakup kegiatan yang mengidentifikasi isu-isu pembangunan manusia serta latar belakang atau factor-faktor yang mempengaruhinya.

Tersusunnya buku ini adalah berkat kerja sama yang baik antara Dinas/Instansi/Lembaga yang ada di Kabupaten Batang. Harapan kami dengan tersusunnya buku ini dinas-dinas terkait dapat menyusun program dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan prioritas "Peningkatan Layak Hidup Masyarakat". Akhirnya semoga buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Batang Tahun 2010 dapat bermanfaat dan dimanfaatkan. Terima kasih.

Batang, Juli 2011

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Batang  
Sekretaris,



PUTUT HUSAMADIMAN, SE

NIP. 19580111 198511 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I</b> Pendahuluan .....	1
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.2. Metodologi .....	3
<b>BAB II</b> Demografi dan Kependudukan .....	14
2.1. Kondisi Pembangunan Manusia .....	14
2.2. Angka Komponen IPM Kabupaten Batang .....	15
<b>BAB III</b> Bidang Kesehatan .....	22
3.1. Keluhan Kesehatan .....	23
3.2. Penolong Kelahiran Pertama .....	23
3.3. Keluarga Berencana .....	25
3.4. Perumahan .....	27
3.5. Fasilitas Kesehatan .....	33



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 .....	2
Tabel 1.2 Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Batang Tahun 2007-2010....	2
Tabel 1.3 Nilai Ekstrim Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang Digunakan dalam Perhitungan .....	9
Tabel 1.4 Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan Untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS) .....	11
Tabel 2.1 Indikator Potensi Sosial Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2005-2010 .....	15
Tabel 2.2. Persentase Rumah tangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2009 dan 2010 .....	17
Tabel 2.3. Komponen Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tahun 2010 ....	21
Tabel 3.1. Persentase Penderita Keluhan Kesehatan di Kabupaten Batang tahun 2009-2010 .....	23
Tabel 3.2. Persentase Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Batang Tahun 2009-2010.....	25
Tabel 3.3 Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2010 .....	26
Tabel 3.4. Persentase Jenis Lantai yang Digunakan Rumah tangga di Kabupaten Batang Tahun 2010.....	28
Tabel 3.5. Persentase Status Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Rumah tangga di Kabupaten Batang Tahun 2010.....	29
Tabel 3.6. Persentase Sumber Air Bersih/Air Minum Rumah tangga di Kabupaten Batang Tahun 2010 .....	30
Tabel 3.7. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan Yang Digunakan di Kabupaten Batang tahun 2010 .....	31

Tabel 3.8. Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Batang Tahun 2010 .....	32
Tabel 3.9. Persentase Rumah tangga Menurut Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Batang Tahun 2010 .....	33
Tabel 3.10. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2007-2010 .....	34
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Umur 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009-2010 .....	35
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009-2010 .....	36
Tabel 4.3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Yang Tidak Bisa Membaca dan Menulis Tahun 2009-2010 .....	38
Tabel 4.4. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2009-2010 .....	38
Tabel 4.5. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2009-2010 .....	39
Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 .....	40
Tabel 5.1. Persentase Angkatan Kerja Tahun 2009-2010 .....	41
Tabel 5.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010.....	42
Tabel 5.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2009-2010 .....	43
Tabel 5.4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009-2010 .....	44
Tabel 5.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu Seluruhnya Tahun 2010 .....	44

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 1. Persentase Rumah tangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran per Rumah tangga Sebulan (000) Tahun 2010 .....	17
Grafik 2. Persentase Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2010 .....	24
Grafik 3. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009-2010 .....	37
Grafik 4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2010 .....	45

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Kabupaten Batang mempunyai luas wilayah 788,64 km<sup>2</sup> (2,42% dari luas Jawa Tengah) merupakan salah satu daerah agraris di Propinsi Jawa Tengah. Dan juga merupakan salah satu daerah pantura yang cukup strategis. Jarak ibukota kabupaten (Batang) ke ibukota propinsi (Semarang) sejauh 93 km. Kabupaten Batang terdiri atas 15 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Kabupaten Batang terletak diantara 006°51'46" dan 007°11'47" garis Lintang Selatan serta 109°40'19" dan 110°03'06" garis Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Jumlah penduduk Kabupaten Batang tahun 2010 sebesar 710.423 jiwa dengan kepadatan 901 jiwa/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan sebesar 0,44 %.

Dari hasil registrasi penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Batang sebesar 710.423 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 354.650 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 355.773 jiwa (sex ratio = 99,68). Kepadatan penduduk Kabupaten Batang tahun 2010 sebesar 901 jiwa per km<sup>2</sup>. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang. Kemudian disusul Kecamatan Bandar, Gringsing, Bawang, Warungasem, Subah dan Kandeman, Sedangkan jumlah penduduk yang lebih kecil tersebar di Kecamatan Blado, Limpung, Reban, Tersono, Tulis, Banyuputih, Wonotunggal dan Pecalungan.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang tahun 2010 menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2010 yaitu sebesar 0,44 %. Sedangkan struktur

umur penduduk masih terbanyak pada kelompok usia dewasa yaitu 69,09 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2010**

Kelompok Umur	Jumlah
(1)	(2)
1. < 15	219.574
2. 15 – 64	458.621
3. 65+	32.228

*Sumber: BPS Kabupaten Batang*

Pada tahun 2010 di Kabupaten Batang terjadi penurunan angka kelahiran kasar (CBR) dan angka kematian kasar (CDR). Perkembangan fertilitas dan mortalitas penduduk Kabupaten Batang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2. Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Batang  
Tahun 2008-2010**

Indikator	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. CBR	4,93	5,03	4,61
2. CDR	2,23	2,15	1,94

*Sumber: BPS Kabupaten Batang*

Stabilitas politik sepanjang tahun 2010 cukup mantap, sehingga di bidang ekonomi semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,24 % yaitu 3,73 % tahun 2009 menjadi 4,97 % tahun 2010. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian

yaitu 2,95 %, kemudian diikuti sektor konstruksi 4,04 %, sektor pertambangan dan penggalan 4,40 %, sektor industri pengolahan 4,83 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,33 %, sektor keuangan dan jasa perusahaan 5,56 %, sektor listrik, gas dan air bersih 5,87 %, sektor angkutan dan komunikasi 7,16 %, dan sektor jasa-jasa perusahaan dan lainnya 8,63 %.

## 1.2. Metodologi

### 1.2.1. Arti dan Ruang Lingkup Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia atau yang biasa disebut human development yang dirumuskan oleh The United Nation Development Programme (UNDP) adalah sebagai perluasan pilihan bagi penduduk. Perluasan pilihan merupakan proses upaya untuk mencapai taraf yang ingin dicapai. Pada proses tersebut, pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan yang didapatnya.

IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan (kinerja) pembangunan manusia.

Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh badan dunia tersebut tentunya jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar (pangan, sandang dan perumahan) dan kesejahteraan manusia. Sedangkan konsep yang dikembangkan UNDP mengandung empat (4) unsur yaitu **produktifitas (*productivity*)**, **pemerataan (*equity*)**, **kesinambungan (*sustainability*)** dan **pemberdayaan (*empowerment*)**.

Pembangunan manusia jika dilihat dari sisi pelaku dan sasaran merupakan model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk dan oleh penduduk. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *tentang penduduk*; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
- b. *untuk penduduk*; berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri.

c. *oleh penduduk*; berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Prinsip pembangunan manusia seperti yang telah disebutkan di atas sebenarnya telah sesuai dengan hakikat dan strategi pembangunan nasional juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Indeks pembangunan manusia digunakan oleh The United Nation Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990 guna mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Dalam studi ini indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur keberhasilan (kinerja) pembangunan manusia pada tingkat kabupaten di Jawa Tengah khususnya untuk Kabupaten Batang. Studi ini dapat menggambarkan kemajuan pembangunan pada suatu wilayah dengan menggunakan indikator-indikator kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli.

### **1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Penjelasan pada butir 1.1 di atas memberikan gambaran bahwa konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang sangat luas. Perluasan pilihan menurut The United Nation Development Programme (UNDP) hanya mungkin dapat terealisasi jika penduduk memiliki : peluang umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif untuk memperoleh uang sehingga memiliki daya beli. Konsep pembangunan manusia seperti yang tersebut di atas paling tidak akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia untuk suatu kabupaten/propinsi/negara.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan The United Nation Development Programme (UNDP) untuk menyusun indeks komposit pembangunan manusia (IPM), indikator yang diperlukan adalah :

- a. Angka harapan hidup (*life expectation at age 0/e<sub>0</sub>*).
- b. Angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate/lit*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/mys*).
- c. Paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Indikator pertama mengukur "umur panjang dan layak hidup (*decent living*) sehat", angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur "pengetahuan (*knowlegde*) dan keterampilan (*skill*)". Sedangkan indikator terakhir yaitu "*Paritas daya beli*" untuk mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya beli ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator tersebut yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan Human Development Index (HDI) yang dalam publikasi ini diterjemahkan menjadi IPM.

### 1.2.3. Fungsi dan Keterbatasan

Pada dasarnya HDI atau IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat banding ini sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH). IMH disusun dari tiga komponen : (1) angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*), (2) angka harapan hidup umur satu tahun ( $e_1$ ), dan (3) angka melek huruf (*Lit*). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili oleh salah satu saja. Kelemahan inilah yang antara lain melatarbelakangi dikembangkannya IPM.

IPM nampaknya meneruskan tradisi mengemban nama yang cukup "bombastis" seperti halnya IMH, yaitu mencoba menggambarkan suatu pembangunan manusia atau mutu hidup dalam suatu indeks. Adalah suatu kemustahilan bahwa pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan satu indeks komposit, tak peduli seberapa banyak komponen indikatornya (apalagi jika diingat bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam

indeks komposit tersebut semakin tinggi pula kemungkinan besarnya kesalahan). Hal sama juga berlaku bagi IMH, karena mutu hidup sendiri juga mempunyai dimensi yang sangat luas.

Disamping itu, IPM juga masih mempunyai kelemahan seperti yang terkandung pada IMH yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding internasional. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Akhirnya, kelemahan lain yang juga melekat dalam suatu indeks komposit seperti IPM adalah ketidakmampuannya dalam memberikan saran kebijaksanaan (policy implication) yang jelas, dan ini memang bukan tujuan pembentukan indeks tersebut.

Dibalik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia diakui secara luas.

#### **1.2.4. Tujuan dan Cakupan Studi**

Studi ini diharapkan mampu menyajikan kinerja pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Batang sesuai dengan perspektif The United Nation Development Programme (UNDP), sebagai pembanding adalah kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan dengan dipilihnya nilai maksimum dan minimum yang tetap, termasuk pula tingkat daya beli yang sudah dikonstankan.

Secara umum, metodologi yang digunakan dalam studi ini mengikuti metodologi yang telah diterapkan The United Nation Development Programme (UNDP) dalam menyusun HDI 1994. Dalam beberapa hal, dilakukan "penyempurnaan" terutama dalam penyusunan indeks daya beli antar kabupaten/kota (PPP).

### 1.2.5. Rumus Umum IPM

Komponen IPM terdiri dari angka harapan hidup ( $e_0$ ) yang menggambarkan tingkat kesehatan yang diperlihatkan dengan rata-rata panjang umur. Selanjutnya komponen pendidikan yang diperoleh dari komponen angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS) dengan perbandingan 2:1. Dan terakhir komponen daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Sebelum dilakukan penghitungan IPM yaitu menghitung dengan menggabungkan nilai ketiga komponen tersebut, terlebih dahulu dari masing-masing komponen dihitung indeksinya yang nilainya antara 0 dan 1 atau 0 dan 100 (dengan mengalikan 100). Nilai 0 menggambarkan keadaan yang terburuk sedang nilai 1 atau 100 (jika dikalikan 100) menggambarkan keadaan yang terbaik. Dalam laporan ini indeks dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran. Penyusunan indeks tersebut pada dasarnya adalah mengikuti rumus sebagai berikut :

$$I_{(i)} = \frac{[X_{(i)} - \text{Min}.X_{(i)}]}{[\text{Max}.X_{(i)} - \text{Min}.X_{(i)}]}$$

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 I_{(i)}$$

$$i = 1, 2, 3$$

dimana :  $I_{(i)}$  = Indeks komponen IPM ke-i;

$X_{(i)}$  = Nilai komponen IPM ke-i;

$\text{Max}. X_{(i)}$  = Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi;

$\text{Min}. X_{(i)}$  = Nilai komponen IPM ke-i yang terendah;

IPM = Indeks Pembangunan Manusia kabupaten;

Dalam penghitungan IPM ini, nilai ekstrim menggunakan nilai yang ditetapkan oleh The United Nation Development Programme (UNDP) (1994), sehingga indeks masing-masing komponen dapat dibandingkan dengan daerah lain (untuk komponen  $e_0$ , Lit dan MYS).

Dengan penetapan nilai ekstrim yang digunakan memberikan keuntungan bahwa angka IPM yang dihasilkan :

1. Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan dapat tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).
2. Dapat diletakkan pada skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

#### 1.2.6. Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )

Variabel/komponen  $e_0$  mencerminkan "panjang umur" sekaligus "kesehatan" suatu kelompok masyarakat. Sebenarnya untuk komponen kesehatan

Angka harapan hidup ( $e_0$ ) mencerminkan "panjang umur" sekaligus "kesehatan" suatu kelompok masyarakat.

akan lebih tepat apabila digunakan "morbiditas", tetapi karena "angka morbiditas" sulit untuk mendapatkannya maka sementara ini belum dapat dipasang dalam studi penghitungan IPM.

Estimasi penghitungan angka  $e_0$  dari sensus atau survei sebenarnya memberikan gambaran keadaan 3 sampai dengan 4 tahun sebelum pencacahan. Sebagai contoh, besarnya  $e_0$  Jawa Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990 sebesar 60,3 dan pada tahun 1993 sebesar 63,8 (hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1995). Sedangkan, untuk menghitung besarnya  $e_0$  dari setiap kabupaten/kota dapat menggunakan hasil Sensus, Susenas atau Supas. Jika

dibandingkan dari ke tiga hasil pengumpulan data tersebut besarnya  $e_0$  ada yang berbeda tetapi beberapa kabupaten menunjukkan angka yang konsisten.

**Tabel 1.3. Nilai Ekstrim Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
yang Digunakan dalam Penghitungan**

Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maximum
(1)	(2)	(3)
1. Angka harapan hidup ( $e_0$ )	25,0	85,0
2. Angka melek huruf (Lit)	0	100
3. Rata-rata lama sekolah (MYS )	0	15
4. Purchasing Power Parity (PPP)	140,0	1994,0

*Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah*

Catatan : Nilai minimum dan maximum sesuai ketentuan The United Nation Development Programme (UNDP) (1994 : 108)  
Dikutip dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perbandingan Antar Propinsi 1990 - 1993, Hal 9, kecuali untuk PPP

### 1.2.7. Angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS)

Indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa. Bangsa yang cerdas akan mempunyai pengetahuan yang luas sehingga akan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan memperluas usaha untuk memperoleh kesempatan mendapatkan kesejahteraan.

Indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk.

Melek huruf (Lit) menurut konsep yang biasa digunakan setiap sensus atau survei " mampu membaca dan menulis". Ada sedikit perubahan

akan mempengaruhi hasil yang diperolehnya, misalnya diubah menjadi "mampu membaca pesan tertulis sederhana". Demikian juga apabila dalam pengumpulan datanya menggunakan alat peraga. Tetapi di Indonesia angka melek huruf ditanyakan "mampu membaca dan menulis" saja.

Catatan lain mengenai Lit adalah indikator tersebut tidak terlalu peka menggambarkan variasi antar kabupaten/kota. Dampak kelemahan tersebut berkurang dengan memasukkan MYS dalam penghitungan rata-rata indeks pendidikan (IP) yang menurut The United Nation Development Programme (UNDP) dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IP = \frac{2}{3} \text{ Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS}$$

Populasi yang digunakan The United Nation Development Programme (UNDP) untuk penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel "pendidikan"/jenjang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^7 (f_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^7 f_i}$$

dimana :

MYS : rata-rata lama sekolah (dalam tahun);

$f_i$  : frekuensi penduduk yang berumur 15 tahun keatas untuk jenjang pendidikan ke-i;

$S_i$  : skor masing-masing jenjang pendidikan ke- $i$ ;

$i$  : jenjang pendidikan ( $i = 1,2,\dots,7$ );

**Tabel 1.4. Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)**

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Belum tamat SD	3
3. Tamat SD	6
4. Tamat SMP	9
5. Tamat SMA	12
6. Tamat D3	15
7. Tamat D4/Sarjana	16,5

#### 1.2.8. Pengukuran Purchasing Power Parity (PPP)

Dasar penghitungan PPP yang digunakan The United Nation Development Programme (UNDP) (United Nations Development Programme) adalah Gross National Product (GNP). Karena GNP tidak dapat dibandingkan secara langsung, maka dibentuk proyek berskala Internasional (International Comparison Project/ICP) dengan tugas utama "menyesuaikan" angka riil GNP sehingga dapat dibandingkan. Untuk maksud ini ditentukan sejumlah komoditi sebagai paket untuk perbandingan secara internasional. Angka yang dihasilkan, untuk mencerminkan daya manfaat yang standar, masih "d disesuaikan" lagi dengan *formula Atkinson*.

Penyesuaian tersebut dianggap perlu, karena kenaikan \$ US 500 bagi negara yang sudah memiliki GNP \$ US 5000 akan memiliki manfaat yang berbeda dengan kenaikan yang sama bagi negara yang baru mempunyai GNP \$ US 1000. Penyesuaian dengan formula Atkinson pada dasarnya menggunakan prinsip

*diminishing marginal utility* yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Adjusted } Y^{**}_{(i)} &= Y^*_{(i)} && \text{jika } Y^*_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(Y^*_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < Y^*_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Y^*_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < Y^*_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(Y^*_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < Y^*_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

dimana :

$Y^{**}_{(i)}$  = GNP riil yang sudah disesuaikan dengan PPP

Z = "threshold" atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya menggunakan garis kemiskinan)

Untuk mengukur "daya beli" penduduk antar kabupaten/kota sebenarnya tersedia berbagai alternatif seperti PDRB; rata-rata konsumsi dari Susenas ditimbang dengan Indeks Harga Konsumen (IHK); dan rata-rata konsumsi dari Susenas yang disesuaikan dengan indeks PPP. Hasil evaluasi secara cermat menunjukkan bahwa indikator terakhir dianggap paling baik sebagai ukuran daya beli antar propinsi. PDRB tidak digunakan karena, penduduk suatu kabupaten tidak langsung menikmati hasil produksi di masing-masing kabupaten. Rata-rata konsumsi yang dikoreksi dengan IHK tidak dipilih sebagai indikator PPP karena IHK hanya mencerminkan perbedaan daya beli daerah perkotaan. Disamping itu paket komoditi yang dipergunakan dalam penghitungan IHK kurang mencerminkan kondisi pada saat tertentu karena hanya ditentukan dalam 5 atau 10 tahun sekali (*out of date*). Lebih lanjut, indeks yang dihasilkan hanya benar untuk perbandingan antara dua kabupaten/kota (tepatnya antara Semarang yang dijadikan tolok ukur dengan kabupaten/kota lain) atau *binary comparison*. Namun demikian, angka IHK di 35 kabupaten/kota tetap digunakan sebagai deflator dalam menghitung nilai perkiraan nilai PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam studi ini "daya beli" diukur dengan PPP yang dihitung berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung angka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk setiap kabupaten/ kota dengan menggunakan data Susenas 2010 yang mencakup pengeluaran konsumsi untuk semua jenis barang dan jasa. Hasil penghitungan ini selanjutnya dikalikan 12 untuk memperoleh angka tahunan (dinotasikan dengan E).
2. Menghitung nilai pengeluaran riil (dinotasikan  $\hat{E}$ ) agar nilai tersebut dapat dibandingkan antar waktu. Cara penghitungannya ialah dengan membagi rata-rata pengeluaran dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2007 pada masing-masing kabupaten/kota. IHK tersebut dihitung berdasarkan tahun dasar 1996.
3. Menghitung nilai PPP dalam rupiah  $Y^*(i)$  dengan rumus :

$$Y^*(i) = \frac{\hat{E}(i)}{R(i)}$$

Dimana

- $Y^*(i)$  : PPP (rupiah)  
 $\hat{E}(i)$  : Pengeluaran per tahun dalam harga konstan  
 $R(i)$  : PPP (unit)  
 (i) : Kabupaten/Kota ke-i

4. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) dengan formula Atkinson sebagaimana disajikan sebelumnya ( $=Y^{**}(i)$ ).

## BAB II KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

### 2.1. Nilai IPM Kabupaten Batang

Nilai IPM Kab. Batang tahun 2010 sebesar 70,41.

Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Batang tahun 2010 mencapai 70,41. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 69,84 maka nilai IPM 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,57.

Angka IPM Kabupaten Batang tahun 2010 masih rendah (70,41) dari angka "ideal" 100. Relatif rendahnya angka IPM terutama berkaitan dengan masih rendahnya PPP. Dengan perkataan lain, rendahnya kinerja pembangunan manusia berkaitan dengan masih rendahnya "daya beli" penduduk.

IPM tahun 2010 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu ranking ke 32 dari 35 Kab/Kota se Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota se Eks Karsidenan Pekalongan, Kabupaten Batang menempati urutan ke 4 dari 7 Kab/Kota se Eks Karsidenan Pekalongan. Kota Pekalongan menempati urutan pertama (rangking ke 5 se Jawa Tengah), kemudian Kota Tegal (rangking ke 8 se Jawa Tengah), Kabupaten Pekalongan (rangking ke 22 se Jawa Tengah), Kabupaten Tegal (rangking ke 29 se Jawa Tengah), Kabupaten Batang (rangking ke 31 se Jawa Tengah), Kabupaten Pemalang (rangking ke 34 se Jawa Tengah) dan Kabupaten Brebes (rangking ke 35 se Jawa Tengah).

Salah satu acuan untuk melihat posisi pembangunan manusia suatu kabupaten adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan kabupaten tersebut. PDRB perkapita Kabupaten tahun 2009 lebih besar dari pada tahun 2010. Tahun 2009 pertumbuhan ekonominya sebesar 3,73 % dan setahun kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,24 % menjadi sebesar 4,97 %. Untuk mengetahui lebih jelas keadaan perkembangan perekonomian Kabupaten Batang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.1. Indikator Potensi Sosial Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun dasar 2000) Kabupaten Batang Tahun 2006 – 2010**

Tahun	PDRB adhb (rupiah)	PDRB Perkapita (rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2006	3.503.532.450	5.060.985	2,51
2. 2007	3.878.725.202	5.563.273	3,49
3. 2008	4.356.752.720	6.202.445	3,67
4. 2009	4.685.020.777	6.636.909	3,73
5. 2010	5.268.572.816	7.431.390	4,97

Sumber: BPS Kabupaten Batang

## 2.2. Angka Komponen IPM Kabupaten Batang

### 2.2.1. Hasil Penghitungan PPP

Keberhasilan pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batang khususnya, diharapkan memberi dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memang tidak mudah untuk diukur karena tidak dapat dilihat. Untuk itu dicoba suatu alat ukur untuk melihat kondisi "kesejahteraan masyarakat", meskipun yang diamati hanya kesejahteraan fisik. Alat yang digunakan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari beberapa indeks. Indeks ini pada dasarnya dapat digunakan untuk membandingkan daerah yang satu dengan daerah yang lain pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat seberapa jauh kemampuan pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan, yang memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia. Salah satu komponen yang digunakan adalah komponen pendapatan.

Komponen pendapatan atau lebih dikenal sebagai indikator PPP sebagai ukuran "paritas daya beli", mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. IPM secara konseptual jelas lebih lengkap dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia daripada IMH. Karena IMH yang tinggi hanya merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang (dan sehat) serta tingkat pendidikan (dan ketrampilan) yang memadai. Menurut UNDP kondisi tersebut belum memberikan gambaran yang ideal karena belum memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai, sehingga memperoleh sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*purchasing power*). Pemenuhan kebutuhan seperti itu yang dicoba diukur dengan PPP.

Dalam pembahasan ini salah satu wilayah di Jawa Tengah yang akan dihitung nilai komponen dan indeks komponennya adalah Kabupaten Batang. Daerah ini merupakan salah satu kabupaten di daerah pantura Propinsi Jawa Tengah dengan potensi sumber daya alamnya terutama pertanian. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini sebesar 4,97 % pada tahun 2010. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Batang pada tahun 2010 mencapai Rp. 7.431,390 juta atas dasar harga berlaku.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pengeluaran makanan dan bukan makanan selama ini menggunakan data hasil Susenas, dan digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan indeks PPP.

**Tabel 2.2. Persentase Rumahtangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran Per Rumahtangga Sebulan Tahun 2009 dan 2010**

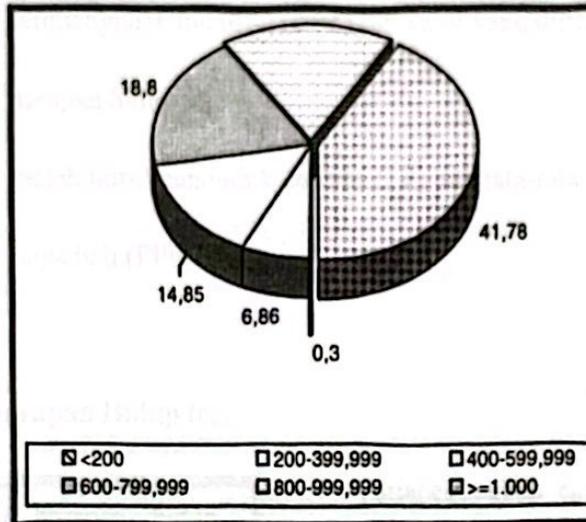
Golongan Pengeluaran Per Rumahtangga sebulan (000)	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. <200	0,10	0,30
2. 200 – 399,999	5,90	6,86
3. 400 – 599,999	13,70	14,85
4. 600 – 799,999	23,0	18,80
5. 800 – 999,999	19,50	17,40
6. $\geq 1.000$	37,70	41,78

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pola pengeluaran rumahtangga Kabupaten Batang per bulan sangat menarik untuk dianalisa karena sebagian besar berada pada tingkat pengeluaran  $\geq 1000.000,00$  rupiah merupakan persentase pengeluaran tertinggi yaitu sebesar 41,78 % kemudian disusul golongan pengeluaran Rp 600.000,00 – 799.999,00 yaitu sebesar 18,80%. Untuk golongan pengeluaran terkecil (<200.000,00 rupiah) sebesar 0,30%.

Sehingga secara keseluruhan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kondisi tahun 2010 mengalami pergeseran, yang cenderung semakin meningkat jumlah pengeluarannya. Akan tetapi untuk golongan pengeluaran lebih besar dari 400.000 – 999.999 rupiah mempunyai kecenderungan mengalami penurunan yang relatif besar sebaliknya untuk golongan pengeluaran  $\leq$  dari 400.000 rupiah dan  $\geq 1000.000$  rupiah mengalami peningkatan yang relatif besar juga, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga baik makanan maupun non makanan sebagai dampak kenaikan perubahan harga barang atau jasa. Nominal uang yang dibelanjakan menunjukkan adanya peningkatan tetapi jumlah barang/jasa yang diperoleh mungkin lebih sedikit dibanding ketika harga-harga belum naik.

**Gambar 1. Persentase Rumahtangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran Per Rumahtangga Sebulan (000) Tahun 2010**



Dari data tersebut secara riil belum dapat diukur sampai seberapa jauh peningkatan yang sebenarnya dari pendapatan penduduk, mengingat pendekatan yang dilakukan dari sisi pengeluaran. Sudah barang tentu pengaruh kenaikan harga barang yang dikonsumsi masih termasuk di dalam pengeluaran rumahtangga.

Pola konsumsi rumahtangga di Kabupaten Batang sebagian besar masih untuk pengeluaran makanan yaitu 53,27% dan (46,73%) untuk non makanan.

Tahun 2010, pola konsumsi rumahtangga di Kabupaten Batang sebagian besar masih untuk pengeluaran makanan yaitu 53,27% dan sisanya (46,73%) untuk non makanan. Kondisi ini menggambarkan

bahwa sebagian besar pengeluaran rumahtangga di Kabupaten Batang masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan primer.

## 2.2.2. Komponen dari IPM

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan UNDP, untuk menyusun indeks komposit pembangunan manusia (IPM) indikator yang diperlukan adalah :

- a. Angka harapan hidup ( $e_0$ )
- b. Angka melek huruf penduduk dewasa (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS)
- c. Paritas daya beli (PPP)

### 2.2.2.1. Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )

Angka harapan hidup ( $e_0$ ) Kabupaten Batang mencapai 70,11 tahun.

Variabel/peubah  $e_0$  diharapkan menjadi indikator "lama hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Hal itu sebenarnya "berlebihan" mengingat angka morbiditas akan lebih valid dalam mengukur "hidup sehat". Walaupun demikian, karena hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas (angka kesakitan) yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan. Sebenarnya dalam Susenas, variabel morbiditas (angka kesakitan) telah dikumpulkan datanya sehingga dapat digunakan untuk tujuan perbandingan namun sejauh ini belum diketahui tingkat kecermatannya sehingga belum digunakan dalam studi ini.

Untuk tahun 2010 estimasi angka  $e_0$  yang digunakan diperoleh dari angka Susenas 2010. Pendekatan yang digunakan untuk estimasi  $e_0$  adalah anak yang pernah dilahirkan hidup (ALH) dan anak yang masih hidup dari wanita pernah kawin berumur 15-49 tahun. Dengan menggunakan paket program MORTPAK-LITE maka akan diperoleh angka harapan hidup ( $e_0$ ). Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Batang mencapai 70,11 tahun.

### 2.2.2.2. Angka Melek Huruf (Lit)

Angka melek huruf (Lit) Kabupaten Batang sebesar 88,09.

Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka Melek Huruf merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu membaca dan menulis dan sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Angka Lit Kabupaten Batang pada tahun 2010 mencapai 88,09 persen.

### 2.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Rata-rata lama sekolah (MYS) Kabupaten Batang sebesar 6,71 tahun.

Seperti halnya Angka Melek Huruf (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan UNDP untuk penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Data yang digunakan untuk penghitungan MYS adalah data hasil Susenas 2010. MYS Kabupaten Batang sebesar 6,71 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas diperoleh bahwa lamanya penduduk bersekolah secara rata-rata masih rendah (dibawah 7 tahun). Hal ini berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Batang baru tamat Sekolah Dasar.

#### 2.2.2.4. Purchasing Power Parity (PPP)

PPP Kabupaten Batang sebesar 630,11 ribu rupiah.

Gambaran mengenai kemampuan daya beli masyarakat dapat diperoleh dari besarnya angka PPP. Nilai PPP Kabupaten Batang pada tahun 2010 sebesar 630,11 ribu rupiah.

**Tabel 2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Tahun 2009 dan 2010**

Komponen IPM	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Harapan Hidup ( $E_0$ )	69,88	70,11
2. Melek Huruf (Lit)	87,74	88,09
3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,34	6,71
4. PPP (000 Rp)	628,82	630,11

Sumber : Penghitungan IPM Prov. Jawa Tengah 2009 dan 2010

### BAB III BIDANG KESEHATAN

Perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional yaitu dengan mengusahakan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang kesehatan yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Bidang kesehatan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional yaitu dengan mengusahakan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang

kesehatan yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bidang kesehatan merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi kesehatan penting dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan yang diperoleh hanya dapat dinikmati oleh manusia yang sehat. Tingkat kesehatan juga akan sangat berpengaruh pada harapan hidup. Semakin tinggi derajat kesehatan seseorang semakin tinggi harapan hidupnya. Dengan harapan hidup yang tinggi, maka kesempatan untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan juga akan semakin besar.

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Batang akan dipaparkan dengan menggunakan beberapa indikator kesehatan. Indikator kesehatan yang akan dilihat yaitu mulai dari penolong persalinan pertama sampai dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Selain itu akan dilihat juga kondisi perumahan, karena terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas perumahan dengan derajat kesehatan.

### 3.1. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan merupakan kondisi dimana seseorang merasakan adanya gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Pada tahun 2010 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 20,60 %, kondisi tersebut secara total persentasenya cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009 (20,70%). Dengan jenis keluhan terbanyak adalah batuk (10,34%), pilek (9,21%), panas (7,11%) dan sakit kepala berulang (3,57%).

Penderita laki-laki relatif lebih banyak jika dibandingkan penderita perempuan, yaitu 50,98% untuk laki-laki dan 49,02% penderita perempuan.

**Tabel 3.1. Persentase Penderita Keluhan Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2009 dan 2010**

Penderita	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	49,20	50,98
2. Perempuan	50,80	49,02
TOTAL	100,00	100,00

*Sumber: BPS Kabupaten Batang*

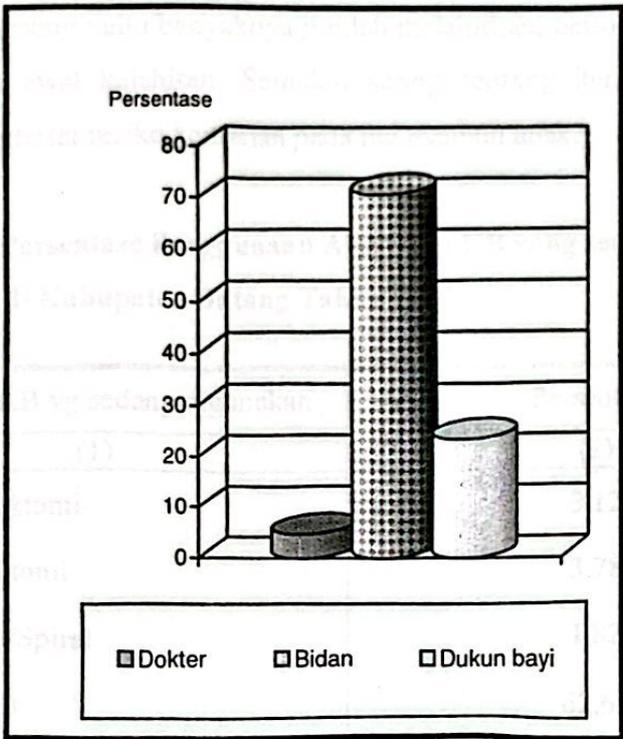
### 3.2. Penolong Kelahiran Pertama

Penolong kelahiran pertama sangat mempengaruhi kondisi bayi dan ibu yang melahirkan. Pada tahun 2009 penolong kelahiran sebagian besar ditangani oleh bidan sebesar 70,96 %, dan disusul Dukun bayi sebesar 23,15 % dan Dokter yaitu sebesar 4,75 %. Secara keseluruhan penolong kelahiran pertama yang ada di Kabupaten Batang didominasi oleh tenaga bidan dan dokter, peranan dukun bayi dalam pertolongan persalinan berangsur-angsur menunjukkan adanya penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa paradigma yang berkembang di masyarakat sudah semakin baik tentang penolong persalinan bayi.

Persentase penolong kelahiran pertama oleh bidan bayi sebesar 70,96 % dan dukun bayi sebesar 23,15 %.

Keberadaan dukun bayi tidak bisa diabaikan karena ketergantungan masyarakat terhadap dukun bayi masih cukup banyak. Sehingga pembinaan dan penyuluhan terhadap dukun bayi harus terus dilaksanakan agar risiko kematian bayi saat persalinan dan awal kelahiran dapat diperkecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :

Gambar 2. Persentase Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2010



### 3.3. Keluarga Berencana

Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan mencapai 62,65 %, kemudian pil KB sebesar 19,58 % dan Susuk KB/Norplan/Implanon/ Alwalit sebesar 7,88 %.

Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keikutsertaan wanita usia subur (15-49 tahun) dengan status kawin dalam keluarga berencana bukan sekedar untuk kepentingan pengendalian pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu dengan mengikuti keluarga berencana akan menyangkut juga dengan kesehatan ibu dan anak. Antara lain yang berpengaruh langsung yaitu banyaknya jumlah melahirkan, pertolongan persalinan, serta perawatan awal kelahiran. Semakin sering seorang ibu melahirkan akan semakin memperbesar resiko kematian pada ibu maupun anak.

**Tabel 3.2. Persentase Penggunaan Alat/Cara KB yang sedang digunakan di Kabupaten Batang Tahun 2010**

Alat/cara KB yg sedang digunakan (1)	Persentase (2)
MOW/Tubektomi	3,12
MOP/Vasektomi	3,78
AKDR/IUD/Spiral	1,82
Suntikan KB	62,65
Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit	7,88
Pil KB	19,58
Kondom/karet KB	0,58
Cara Tradisional	0,58

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pada tahun 2010 peserta KB metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan 62,65 %. Kemudian disusul oleh penggunaan pil sebesar 19,58 % dan tempat ketiga adalah pemakai susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit yaitu sebesar 7,88 %, tempat keempat adalah pemakai MOP/Vasektomi yaitu sebesar 3,78 %, kelima adalah MOW/Tubektomi yaitu 3,12 %, AKDR/IUD/Spiral yaitu sebesar 1,82 %. Sedangkan pemakaian alat/cara KB Kondom/karet KB berada di bawah satu persen.

Banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dipengaruhi oleh masa suburnya. Semakin banyak perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan semakin banyak kemungkinan anak yang dilahirkan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada usia perkawinan pertama seorang wanita.

**Tabel 3.3. Persentase Wanita Pernah Kawin (10 tahun keatas) Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2009 & 2010**

Usia Perawinan Pertama	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. <= 16 tahun	28,43	25,35
2. 17 – 18 tahun	29,22	37,22
3. 19 – 24 tahun	34,21	29,43
4. 25 +	8,14	8,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Batang*

Dari hasil susenas 2010 perkawinan pertama untuk wanita di Kabupaten Batang terbanyak terjadi pada usia 17 - 18 tahun (37,22 %). Kemudian disusul oleh kelompok usia 19 - 24 tahun sebesar 29,43 %. Untuk kelompok usia perkawinan pertamanya <= 16 tahun mencapai 25,35 % sedangkan untuk usia perkawinan pertamanya diatas 25 tahun (25+) hanya 8,00 %.

### 3.4. Perumahan

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah mendapatkan rumah dan lingkungan yang nyaman, aman dan sehat. Arti fisik perumahan, dalam konteks yang diperluas disebut permukiman, yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi, perlindungan dari gangguan dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Rumah yang layak adalah rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan estetika sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi penghuninya. Dengan demikian, kelayakan sebuah rumah dapat dicerminkan oleh fasilitas yang tersedia.

Kelengkapan fasilitas suatu rumah mempunyai korelasi positif dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk rumah tersebut. Semakin lengkap fasilitas suatu rumah akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian semakin tinggi status sosial ekonomi, keadaan rumah semakin lengkap dan bermutu baik. Lengkap artinya fasilitas yang dimiliki rumah tersebut, seperti listrik, telepon, air dan jaringan drainase, serta sistem pembuangan kotoran, semuanya tersedia.

Kondisi perumahan suatu masyarakat dapat dilihat melalui satu paket indikator yang menurut The United Nations Center for Human Settlement (UNCHS 1993) terbagi menjadi : kemampuan memiliki rumah, pembiayaan perumahan, kualitas perumahan, produksi perumahan, subsidi perumahan dan pemeriksaan pengaturan perumahan.

Yang dapat dikumpulkan melalui pendekatan rumah tangga utamanya susenas, dapat dibentuk indikator-indikator perumahan adalah sebagai berikut : kondisi fisik bangunan (rata-rata luas lantai sebagian besar rumah yang dihuni rumah tangga), penguasaan tempat tinggal (status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati), utilitas dan fasilitas tempat tinggal (penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum yang digunakan dan jarak ke tempat penampungan kotoran). Jumlah rumah tangga di Kabupaten Batang pada tahun 2010 mencapai 179.031 rumah tangga.

Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai, baik milik sendiri ataupun bukan. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan-bahan yang tidak membahayakan sehingga menjamin keamanan penghuni, tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan

Kondisi fisik bangunan di Kabupaten Batang menurut rata-rata luas lantai 50 – 99 m mencapai 67,19 %.

kemungkinan terserang penyakit. Rata-rata luas lantai (hunian) per rumahtangga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk.

Semakin luas lantai yang dihuni oleh suatu rumahtangga, semakin baik kondisi (kesehatan) rumahtangga tersebut. Rata-rata luas lantai 50-99 m di Kabupaten Batang tahun 2010 yaitu sebesar 67,19 % dari 179.031 rumahtangga. Rumahtangga dengan rata-rata luas lantai < 20 m mencapai 1,03 % sedangkan rumahtangga dengan rata-rata luas lantai > 150 m yaitu sebesar 4,41 % (tabel 3.4)

**Tabel 3.4. Persentase Jenis Lantai yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Batang Tahun 2010**

Luas lantai bangunan (meter)	2010
(1)	(2)
< 20	1,03
20 - 49	13,89
50 - 99	67,19
100 - 149	13,49
150 +	4,41

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Penguasaan tempat tinggal, memperlihatkan status rumah tersebut apakah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, milik orang tua / sanak / saudara atau lainnya. Demikian pula dengan status hukum tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan

tempat tinggal (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai). Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri pada suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Khususnya di Kabupaten Batang rumahtangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 90,93 %, milik orang tua / sanak / saudara sebesar 6,92 %, kontrak 0,79 %, bebas sewa 0,76 %, dinas 0,17 % dan lainnya 0,13 %, selengkapnya disajikan pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Persentase Status Bangunan Tempat tinggal yang Ditempati Rumah Tangga di Kabupaten Batang Tahun 2010**

Status Bangunan	2010
(1)	(2)
Milik sendiri	90,93
Kontrak	0,79
Sewa	0,30
Bebas sewa	0,76
Dinas	0,17
Rumah milik orang tua/sanak/saudara	6,92
Lainnya	0,13

*Sumber: BPS Kabupaten Batang*

Utilitas dan fasilitas tempat tinggal menunjukkan kelengkapan dan fasilitas serta penggunaan tempat tinggal seperti listrik, telepon dan lain-lain. Semakin lengkap fasilitas dan utilitas hunian suatu rumah, maka menunjukkan bahwa rumahtangga tersebut

semakin nyaman tinggal di rumah tersebut. Persentase rumahtangga yang sudah menggunakan air bersih di suatu daerah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menggunakan air bersih di suatu daerah menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga di daerah tersebut. Untuk pemakaian sumber air bersih/air minum oleh rumahtangga terlihat bahwa air sumur masih merupakan tumpuan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Batang, hal ini terbukti masih mendominasinya rumah tangga yang mengkonsumsi air sumur yaitu sebesar 60,84 %. Sedangkan penggunaan air kemasan dan air ledeng hanya sebesar 12,86 %, sedikit menurun dari tahun sebelumnya (11,76 %). Secara rinci, penggunaan sumber air bersih/air minum dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6. Persentase Sumber Air Bersih/Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Batang Tahun 2010**

Sumber Air Bersih / Air Minum	2010
(1)	(2)
1. Ledeng dan air kemasan	12,86
2. Pompa	4,94
3. Sumur	60,84
4. Mata Air	19,24
5. Lainnya	2,12

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Listrik dalam rumah tangga merupakan suatu kebutuhan pokok, tidak hanya digunakan sebagai penerangan saja tetapi juga untuk membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan rumah tangga, misalnya untuk memasak. Menurut hasil Susenas Kabupaten Batang tahun 2010 dari 179.031 rumah tangga menunjukkan bahwa 97,25 % telah menggunakan listrik sebagai penerangan rumah tangga, pengguna listrik non PLN sebesar 2,09 %. Kemudian yang menggunakan pelita/sentir/obor/lainnya 0,66 %, selengkapnya disajikan pada tabel 3.7.

**Tabel 3.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Yang Digunakan di Kabupaten Batang 2010**

Jenis Sumber Penerangan	2010
(1)	(2)
1. Listrik PLN	97,25
2. Listrik Non PLN	2,09
3. Pelita/Sentir/Obor/Lainnya	0,66

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Fasilitas lain yang menyangkut kesehatan lingkungan suatu rumah tangga yaitu tempat pembuangan/fasilitas buang air besar. Pemilikan sarana tempat buang air besar yang layak, menggambarkan adanya sistem sanitasi lingkungan yang sehat. Persentase penggunaan fasilitas buang air besar untuk milik sendiri mencapai 52,12 % untuk tahun 2010. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi tersebut sedikit mengalami peningkatan (51,20 % tahun 2009). Sedangkan rumah tangga yang sama sekali tidak

mempunyai fasilitas buang air yaitu sebesar 36,51 %, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 (40,99 %) mengalami sedikit penurunan Selengkapnya penggunaan fasilitas buang air besar disajikan pada tabel 3.8.

Dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki sendiri fasilitas buang air besar menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Batang untuk hidup sehat mengalami peningkatan.

**Tabel 3.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Batang 2010**

Fasilitas	2010
(1)	(2)
1. Milik Sendiri	52,12
2. Milik Bersama	6,89
3. Umum	4,48
4. Tidak ada	36,51

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Fasilitas perumahan selanjutnya adalah jarak ke tempat pembuangan kotoran/tinja terdekat bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum menggunakan pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dengan air dalam

kemasan, leding dan pompa diasumsikan telah menggunakan air minum yang sehat menurut standar kesehatan. Di Kabupaten Batang pembuangan kotoran/tinja terdekat yang kurang dari 10 meter mencapai sebesar 24,20 %, lebih besar 10 meter 57,70 % dan rumahtangga yang tidak tahu 18,09 %. Pada tabel 3.8 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga mempunyai jarak ke tempat pembuangan kotoran/tinja terdekat sudah memenuhi syarat kesehatan, yaitu lebih besar dari 10 meter, karena bakteri E-coli masih dapat berkembang bila jarak ke tempat pembuangan kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter sehingga air dimungkinkan tidak sehat lagi.

**Tabel 3.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak keTempat Penampungan Kotoran/tinja di Kabupaten Batang Tahun 2010**

Jarak ke Penampungan	2010
(1)	(2)
$\leq$ 10 meter	24,20
> 10 meter	57,70
Tidak Tahu	18,09

Sumber: BPS Kabupaten Batang

### 3.5. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan merupakan faktor yang penting bagi pemeriksaan dan perawatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu harus ditunjang dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang baik. Semakin dekat dan banyak alternatif

pelayanan kesehatan akan memudahkan pemantauan keluhan kesehatan yang dirasakan masyarakat sekitar. Diharapkan dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan, informasi tentang cara hidup sehat, pencegahan dan perawatan penyakit dapat lebih menjangkau masyarakat.

**Tabel 3.10. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2009 & 2010**

Fasilitas	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Puskesmas (unit)	21	21
2. Puskesmas Pembantu (unit)	45	45
3. Rumah Sakit	1	2
4. Dokter (Umum, Spesialis, Gigi)	71	138
5. Perawat	365	482
6. Bidan	376	461
7. Apoteker	4	11

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Batang

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Umur 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009 & 2010**

Partisipasi Sekolah	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Tidak pernah pernah sekolah/ Tidak bersekolah lagi	1,45	0,37
2. Masih bersekolah	98,55	99,63

Sumber: DPS Kabupaten Batang

## BAB IV BIDANG PENDIDIKAN

Kualitas Sumber Daya Manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, yang salah satunya melalui pembangunan dibidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi penting untuk mewujudkan kesejahteraan karena menjadi dasar dari usaha untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Dengan pendidikan yang cukup akan diperoleh pengetahuan bagaimana cara hidup sehat, meningkatkan daya beli dan kemampuan untuk bertahan hidup.

### 4.1. Tingkat Partisipasi Sekolah

Partisipasi penduduk Kabupaten Batang untuk menyekolahkan anak umur 7-12 tahun di sekolah dasar relatif besar. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk umur 7 – 12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,61 % untuk tahun 2009. Sedangkan yang tidak bersekolah lagi dan tidak/belum pernah sekolah yaitu sebesar 0,39 %.

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Umur 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009 & 2010**

Partisipasi Sekolah	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak bersekolah lagi	1,45	0,39
2. Masih bersekolah	98,55	99,61

*Sumber: BPS Kabupaten Batang*

Penduduk yang masih sekolah untuk usia 7-12 tahun sebesar 99,61 % dan usia 13-15 tahun sebesar 81,39 %.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia mewajibkan seorang anak menyelesaikan sekolah minimal sampai tingkat lanjutan pertama. Program ini sesungguhnya sekaligus merupakan upaya untuk mencegah bertambahnya penduduk buta huruf dan tidak mampu berbahasa Indonesia, khususnya dari kelompok penduduk usia muda. Untuk tahun 2008 tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Batang mencapai 81,39 %. Akan tetapi masih terdapat anak usia 13 – 15 tahun yang belum/tidak bersekolah/ tidak sekolah lagi sebesar 18,61 %. Informasi persentase partisipasi sekolah penduduk umur 13-15 tahun selengkapnya disajikan pada tabel 4.2.

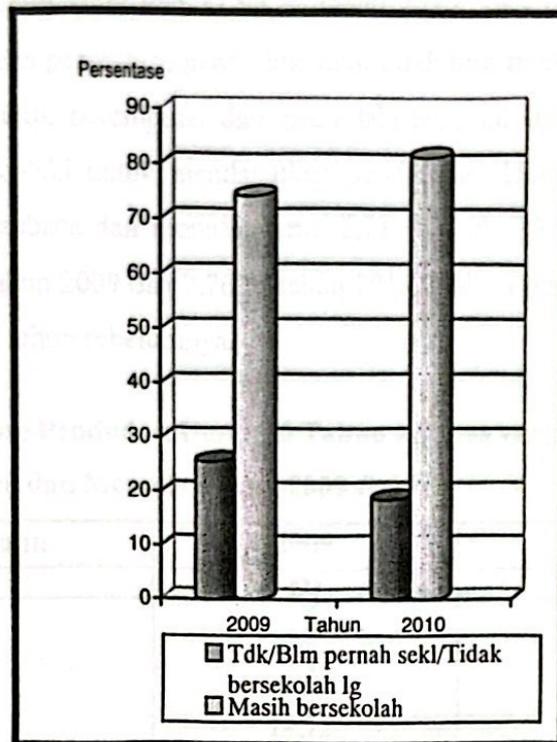
**Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009 & 2010**

Partisipasi Sekolah	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak bersekolah lagi	25,65	18,61
2. Masih bersekolah	74,35	81,39

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun yang lalu, hal ini disebabkan karena murid sekolah SD/MI dan SLTP/MTS tidak semuanya berada pada kelompok umur tersebut, misalnya murid SD ada yang berusia 6 tahun atau lebih besar dari 12 tahun, demikian juga dengan murid SLTP/MTS ada yang berumur kurang dari 13 tahun atau lebih besar 15 tahun.

**Gambar 3. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2009 & 2010**



#### 4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis

Besarnya angka buta huruf di Kabupaten Batang sebesar 7,76 %.

Kemampuan membaca dan menulis seseorang sangat mempengaruhi pengetahuannya. Dewasa ini sangat banyak media massa cetak (seperti : buku, surat kabar dan majalah) yang memberikan informasi/pengetahuan. Dengan membaca dapat membuka dunia cakrawala baru. Bertambahnya wawasan akan mempermudah untuk memperoleh pekerjaan, sehingga secara tidak langsung kemampuan membaca dan menulis dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil Susenas 2007 dan 2008 mengalami peningkatan, periode 2009 dan 2010 kecenderungannya mengalami penurunan yaitu persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf). Persentase laki-laki yang buta huruf tahun 2006 sebesar 4,31 %, naik menjadi 8,01 % tahun 2007, tahun 2008 menjadi 9,65 %, tahun 2009 turun menjadi

7,32 % dan tahun 2010 sebesar 2,51 %. Sedangkan untuk penduduk perempuan yang buta huruf yaitu 16,13 % pada tahun 2007, 16,61 % tahun 2008 dan turun menjadi 14,72 % tahun 2009 dan 12,93 % tahun 2010. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka persentase penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis lebih banyak penduduk perempuan dari pada laki-laki, ini menunjukkan masih adanya prioritas laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Untuk total penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis turun 2,11 % dari 13,22 % tahun 2008 menjadi 11,11 % tahun 2009 dan 7,76 % tahun 2010. Hal ini berarti kondisi tahun 2010 lebih baik dari tahun sebelumnya.

**Tabel 4.3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Bisa Membaca dan Menulis Tahun 2009 & 2010**

Jenis Kelamin	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	7,32	2,51
2. Perempuan	14,72	12,93
<b>Total penduduk</b>	<b>11,11</b>	<b>7,76</b>

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Sedangkan untuk kemampuan membaca dan menulis ini sering diistilahkan dengan melek huruf. Persentase penduduk melek huruf untuk tahun 2010 sebesar 92,24 % dari total penduduk umur 10 tahun keatas.

**Tabel 4.4. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2009 & 2010**

Dapat Baca & Tulis	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Huruf latin dan Huruf Lainnya	88,89	92,24
2. Tidak dapat	11,11	7,76

Sumber: BPS Kabupaten Batang

### 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia penduduk berumur 10 tahun ke atas. Untuk mengetahui pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah dengan mengetahui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

Penduduk umur 10 tahun keatas di Kab. Batang yang tamat SD sebesar 39,49 % sedangkan yang menamatkan perguruan tinggi hanya 4,22 %.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2010 ternyata sebagian besar berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan masih terdapat penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah (7,27 %).

Persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD mencapai 21,58 %, dan yang sudah menamatkannya mencapai 39,49 % dari seluruh penduduk umur 10 tahun keatas. Sedangkan yang tamatan SMP hanya 17,65 %, tamatan SMA/SMK mencapai 9,79 % dan tamatan perguruan tinggi hanya 4,22 %. Secara rinci persentase penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2009 & 2010**

Tingkat Pendidikan	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. Tidak Pernah Sekolah/belum tamat SD	30,91	28,84
2. Tamat SD	39,88	39,49
3. SMP	17,14	17,65
4. SMA & SMK	9,54	9,79
6. Perguruan Tinggi	2,53	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Batang

#### 4.4. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas/sarana pendidikan sangat menunjang untuk berlangsungnya proses pendidikan. Di Kabupaten Batang pada tahun 2009 terdapat 704 sekolah yang terbagi mulai dari jenis Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, dengan jumlah guru sebanyak 7.744 orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya maka semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah siswanya.

**Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010**

Fasilitas Pendidikan	Tingkat Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekolah dikelola Disdikpora	468	58	26
ó Negeri	466	47	9
ó Swasta	2	11	17
2. Sekolah dikelola Depag	116	29	11
ó Negeri	2	1	1
ó Swasta	114	28	10
3. Jumlah Murid	82.982	31.303	13.532
4. Jumlah Guru	5.535	1.823	1.076
5. Rasio Murid terhadap Guru	14,99	17,17	12,58

Sumber: *Disdikpora Kab. Batang dan Depag Kabupaten Batang*

## BAB V ANGKATAN KERJA

Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Batang mencapai 72,66 %.

Konsep angkatan kerja yang dipakai dalam Sakernas 2010 adalah konsep kegiatan seminggu sebelum pencacahan bagi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Kegiatan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dibagi menjadi angkatan kerja (apabila kegiatan seminggu sebelum pencacahan adalah bekerja dan mencari kerja) dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, jompo dan lain-lain). Dari hasil Sakernas 2010 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang mencapai 88,61 %. Sedangkan usia produktif bagi angkatan kerjanya antara umur 15 - 64 tahun mencapai 80,54 %.

**Tabel 5.1. Persentase Angkatan Kerja Tahun 2009 & 2010**

Penduduk	2009	2010
(1)	(2)	(3)
<b>1. Angkatan Kerja</b>	<b>68,99</b>	<b>72,66</b>
➤ Bekerja	92,89	93,52
➤ Pencari Kerja	7,11	6,48
<b>2. Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>31,01</b>	<b>27,34</b>

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Persentase angkatan kerja pada tahun 2010 lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 pencari kerja mencapai 7,11 %, tahun 2010 turun sekitar 0,63 % menjadi 6,48 %.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Batang bekerja di sektor pertanian yaitu 36,59 %.

Bila diperhatikan pada angkatan kerja menurut lapangan usaha, bidang pertanian masih merupakan mata pencaharian terbesar yaitu 36,59 %. Hal ini menggambarkan karakteristik daerah di Kabupaten Batang masih sangat mengandalkan sektor pertanian sebagai penyangga perekonomian. Kemudian sektor industri pengolahan menyerap 21,87 % kemudian disusul sektor perdagangan menyerap 19,54 % tenaga kerja dan sektor konstruksi menyerap tenaga kerja 7,24 %.

**Tabel 5.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010**

Lapangan Usaha	Persentase
(1)	(2)
1. Pertanian	36,59
2. Pertambangan dan Penggalian	0,45
3. Industri Pengolahan	21,87
4. Listrik, Gas dan Air	0,07
5. Konstruksi	7,24
6. Perdagangan	19,54
7. Komunikasi dan Angkutan	3,62
8. Keuangan dan Real Estate	0,72
9. Jasa dan Lainnya	9,89

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Penduduk yang bekerja menurut status usaha/pekerjaan dapat diperhatikan bahwa pada tahun 2010 persentasenya didominasi oleh pekerja bebas pertanian/non pertanian /pekerja tidak dibayar yaitu sebesar 34,16 %. Kemudian penduduk yang bekerja tanpa buruh mencapai sebesar 25,01 %, buruh/karyawan yang dibayar sebesar 21,49 %, berusaha dibantu buruh tetap sebesar 2,45 % dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 16,89. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, kondisi tahun 2010 status pekerjaan penduduk yang bekerja mengalami pergeseran, dapat dilihat pada tabel 5.3. Penduduk yang berusaha tanpa dibantu buruh turun dari 29,69 % pada tahun 2009 menjadi 25,01 %

untuk tahun 2010, kemudian pekerja sebagai buruh/karyawan juga mengalami penurunan yaitu 26,21 % tahun 2009 menjadi 21,49 % tahun 2010. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas pertanian/non pertanian /pekerja tidak dibayar cenderung mengalami peningkatan dari 31,06 % (tahun 2009) menjadi 34,16 % pada tahun 2010.

**Tabel 5.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2009 & 2010**

Status Pekerjaan	2009	2010
(1)	(2)	(3)
<b>1. Berusaha :</b>		
· tanpa buruh	29,69	25,01
· dibantu buruh :		
Ø tidak tetap	11,35	16,89
Ø tetap	1,69	2,45
<b>2. Buruh / Karyawan dibayar</b>	26,21	21,49
<b>3. Pekerja bebas pertanian/non pertanian /pekerja tidak dibayar</b>	31,06	34,16

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Kualitas penduduk yang bekerja dapat diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, mengindikasikan semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja tersebut. Di Kabupaten Batang tahun 2009 ternyata sebagian besar penduduk yang bekerja masih berpendidikan relatif rendah. Sebanyak 68,10 % hanya tamatan sampai dengan SD, sedang yang tamat SMP mencapai 19,61 %, tamat SMA ke atas sebesar 12,29 %.

**Tabel 5.4. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2009 dan 2010**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk	2009	2010
(1)	(2)	(3)
1. ≤ SD	70,32	68,10
2. SMP	16,12	19,61
3. ≥ SMA	13,56	12,29

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Jam kerja (lamanya bekerja) adalah salah satu ukuran untuk mengetahui produktivitas kerja. Pengukuran jam kerja mengasumsikan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi produktivitasnya. Dengan demikian akan berkaitan pula dengan tingkat pendapatan, yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap tingkat kesejahteraan. Berdasarkan asumsi tersebut maka penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dikategorikan sebagai setengah menganggur.

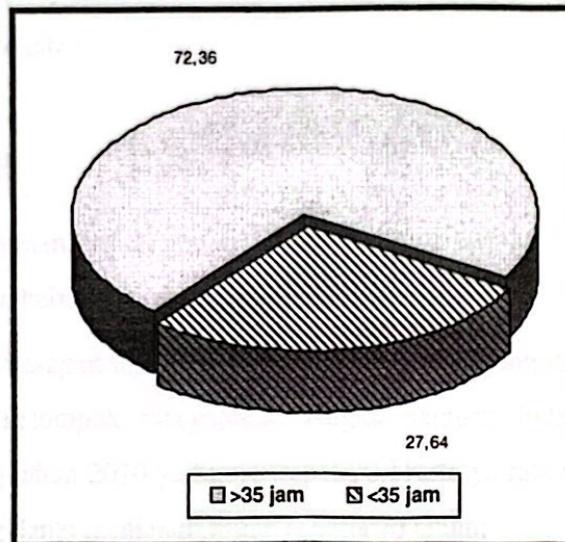
**Tabel 5.5. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2010**

Jam Kerja Seminggu	Persentase
(1)	(2)
1. ≥ 35 jam	72,36
2. < 35 jam	27,64

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Dari tabel 5.5 diketahui bahwa di Kabupaten Batang setengah penganggurannya mencapai 27,64 % (jam kerja < 35 jam) dan sebagian besar yaitu 72,36 % yang bekerja penuh ( $\geq 35$  jam). Untuk lebih jelasnya maka perhatikan gambar berikut ini.

**Gambar 4. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2010**



## BAB VI PENUTUP

Nilai IPM di Kabupaten Batang pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat seperti membaiknya kondisi perekonomian (naiknya pendapatan perkapita) dan membaiknya kondisi kesehatan dengan didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan.

### 6.1. Kesimpulan

Setelah mencermati uraian dan hasil yang disajikan dalam studi ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Angka harapan hidup ( $e_0$ ) mencerminkan “panjang umur” sekaligus kesehatan suatu kelompok masyarakat. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Batang tahun 2010 yaitu mencapai 70,11 artinya rata-rata penduduk Kabupaten Batang dapat menjalani hidup selama 70 tahun;
2. Pendidikan sangat diperlukan untuk membuka peluang penduduk untuk mendapatkan penghasilan lebih baik, cerdas, dan terampil dalam usaha, yang kesemuanya sangat tergantung pada kepandaian membaca dan menulis (melek huruf) dan tingginya tingkat pendidikan. Persentase penduduk Kabupaten Batang berumur 15 tahun ke atas tahun 2010 yang melek huruf sebesar 88,09 %;
3. Persentase rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang tahun 2010 yaitu sebesar 6,71 % artinya bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang sampai dengan Sekolah Dasar/ sederajat.
4. Gambaran mengenai kemampuan daya beli masyarakat dapat diperoleh dari besarnya angka Purchasing power Parity (PPP). Nilai PPP Kabupaten Batang tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 630,11. Semakin tinggi nilai PPP maka semakin baik kemampuan daya beli masyarakat pada suatu daerah.

## 6.2. Saran

Dari hasil penghitungan IPM Kabupaten Batang seperti yang telah disajikan di atas diharapkan akan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

1. Untuk meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Batang maka kondisi sosial ekonomi penduduk harus ditingkatkan demikian juga dengan kesehatan dan penciptaan lingkungan yang aman, nyaman serta sehat;
2. Tingkat pendidikan masyarakat harus diperbaiki mengingat indikator pendidikan yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih cukup rendah. Untuk memberantas buta huruf diperlukan data yang akurat dan tepat sehingga pada kelompok umur berapa sasaran pemberantasan buta huruf dapat dimulai dan lokasinya diwilayah mana agar pemberantasan buta huruf dapat dilaksanakan tepat, efektif dan efisien diperlukan kerjasama dengan SKPD yang dengan terkait pendidikan.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan penyuluhan-penyuluhan program-program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan seperti BOS, beasiswa untuk anak kurang mampu, sekolah gratis dan sebagainya.
4. Daya beli masyarakat Kabupaten Batang masih perlu ditingkatkan dengan cara menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, menjaga agar pendapatan petani cukup tinggi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Batang bermata pencaharian dari sektor pertanian.